**REAKSI KOREA UTARA TERHADAP KEBIJAKAN KOREA SELATAN
MEMBERHENTIKAN BANTUAN EKONOMI TERHADAP KOREA UTARA (2008-
2011)**

R. G. S. MOREN

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Politik

Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru

Panam, Pekanbaru, 28293

Email mooranye@gmail.com

DosenPembimbing:

Drs. Tri Joko Waluyo, M. Si

ABSTRACT

This research explain about the relationship between South Korea and North Korea, describes the relationship between Korean leadership since Lee Myung Bak. Indeed, the relationship between the two Korean is not yet reconciled, they're just only signed a truce agreement in 1953. A trigger disintegration of ideological differences between Korean are utilized by many foreigners, include US.

This study experienced the problems when searching for concrete data about north korea, it's because North Korea is a closed country that make it very difficult to access and also north korea alienate themselves from outsiders, as well as its nuclear holdings. Assisted by several books, journals, various kinds of articles and papers then I can finish this research.

keywords: policy, economic aid, nuclear weapons

PENDAHULUAN

Korea adalah sebuah wilayah semenanjung di Asia Timur yang terpecah menjadi dua negara setelah Perang Dunia II, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Republik Rakyat Demokratis Korea atau sekarang lebih dikenal dengan Korea Utara di wilayah bagian utara yang berhaluan komunis dengan ibukota Pyongyang dan Republik Korea di wilayah selatan dengan ibukota Seoul yang berhaluan liberal terpisah tepat pada garis lintang utara 38 derajat. Dua Korea ini mengalami peperangan dan akhirnya menyetujui untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953. Pelan-pelan Korea Selatan mulai bangkit dengan membangun perekonomiannya. Walau berat, tetapi Korea Selatan tetap menjalankan segala upaya untuk kemajuan negara ini. Sedangkan Korea Utara bersikeras dengan ideologinya, dengan lebih mempertahankan kelengkapan dan kemajuan militer negaranya terutama dibidang persenjataan dibandingkan memikirkan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Hal ini membuat Korea Utara menjadi negara yang tertutup, negara yang tertinggal oleh tetangganya yaitu Korea Selatan dan membutuhkan bantuan ekonomi bahkan bisa dikatakan bergantung dengan bantuan pihak asing.

Sejak kepemimpinan Kim Jong Il yang menggantikan Kim Il Sung, rezim di Korea Utara tidak stabil seperti dahulu yang diakibatkan oleh semakin melebarnya kesenjangan antara mereka yang kaya dan yang miskin, kontrol sosial menjadi mengendur karena para pemimpin mementingkan kekayaan atau uang, kondisi moral serta disiplin anggota militer yang semakin mundur. Akibatnya keadaan ekonomi Korea Utara mengalami stagnasi dan kekurangan makanan dan energi, yang mengakibatkan terjadinya kelaparan dan semakin mempengaruhi kondisi moral bangsa.¹ Dalam semua aspek persaingan ekonomi, Korea Selatan lebih unggul dibandingkan dengan Korea Utara. Dari awal 1960-an Seoul menganggap pembangunan ekonomi sebagai tugas nasional, sedangkan Pyongyang memberikan prioritas utama pada peningkatan kekuatan militernya.²

Pada masa pemerintahan Kim Young Sam tahun 1992, Politik Luar Negeri Korea Selatan fokus pada pertahanan keamanan kawasan, terutama ancaman keamanan yang datang dari Korea Utara. Politik luar negeri pada masa ini telah dikendalikan oleh sipil sehingga kebijakan luar negeri yang menyangkut pertahanan keamanan lebih bersifat persuasif. Kebijakan lainnya yaitu reformasi politik yang cukup membawa dampak positif terhadap hubungan antara Korea. Pada masa pemerintahan Kim Dae Jung Korea Selatan mengeluarkan kebijakan yang diberi nama *Sunshine Policy* yang salah satu bentuk kebijakannya adalah bantuan tanpa syarat kelangkaan pangan di Korea Utara karena keprihatinan kemanusiaan. Korea Selatan memberi Korea Utara bantuan dan usaha kerjasama ekonomi yang signifikan, serta kedua pemerintahan bekerjasama

¹ Abdul Irsan. 2007. *Budaya dan perilaku politik Jepang di Asia*. Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu. hal 171

² Robert A Scalapino & Seizaburd Sato. 1990. "*Masalah Keamanan Asia*."(penyunting), Jusuf Wanandi, Jakarta

dalam mengupayakan pertemuan anggota keluarga yang terpisah dan pariwisata terbatas di situs Korea Utara.³

Perubahan hubungan yang mulai harmonis antara kedua Korea terjadi pada tahun 2007 akhir. Presiden Lee Myung Bak yang menang dalam pemilihan presiden Korea Selatan pada bulan Desember 2007 menawarkan kebijakan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak tercapainya kata sepakat dalam *six party talk* mendorong Korea Utara meneruskan proyek pengayaan uranium yang kemudian memunculkan tekanan yang dilakukan oleh presiden Korea Selatan terpilih, Lee Myung Bak, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskannya berkenaan dengan bantuan terhadap Korea Utara.⁴

Di bawah kebijakan baru, Pemerintah konservatif Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak telah mempertegas posisinya bahwa kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan Pyongyang hanya akan mungkin dilaksanakan apabila Korea Utara sepenuhnya menghentikan operasi fasilitas nuklirnya. Korea Selatan akan menyediakan bantuan ekonomi bagi Korea Utara selama 1 dasawarsa untuk membantu meningkatkan pendapatan perkapita Korea Utara hingga 3000 dolar, namun dengan syarat Korea Utara harus melumpuhkan semua program nuklirnya. Dalam pandangan Lee Myung Bak, dengan mengambil sikap tegas terhadap Korea Utara merupakan kunci untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea⁵.

PEMBAHASAN

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Lee Myung Bak, menimbulkan reaksi yang sangat menentang dari Korea Utara. Diawali dengan serangan-serangan verbal dari media buruh Korea Utara yang mengecam sikap Lee Myung Bak, hingga Korea Utara memutuskan untuk memperketat perbatasan dan melakukan peluncuran rudal jarak jauh, serta berbagai protes keras lainnya sebagai bentuk menentang kebijakan Korea Selatan. Berbagai protes keras ini merupakan Propaganda dari Korea Utara terhadap kebijakan Lee Myung Bak. Seperti yang dikatakan oleh Jack C Plano bahwa salah satu tujuan dari Propaganda adalah memperlemah atau meruntuhkan pemerintah asing atau kebijaksanaannya serta program nasional mereka yang kurang bersahabat, dan menghancurkan propaganda tidak bersahabat dari negara lain atau kelompok lain. Reaksi keras dari Korea Utara merupakan Propaganda yang bertujuan untuk meruntuhkan kebijakan Korea Selatan yaitu mengaitkan bantuan ekonomi dengan nuklir Korea Utara. Menurut Korea Utara Lee Myung Bak hanya memperkeruh suasana dengan kebijakannya, dan mengibarkan

³ Diakses dari <http://archive.kaskus.us/thread/4351938/0/menilik-sejarah-permusuhankorea-utara-dan-korea-selatan> Pada tanggal 11 Januari 2013, 21.30 wib

⁴ Fikri Syuhada. 2009. "*Faktor-Faktor Korea Utara membatalkan Perjanjian Reunifikasi Korea*". Skripsi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Jogyakarta.

⁵ Diakses dari http://rki.kbs.co.kr/vietnamese/news/news_issue_detail.htm?No=12413/korea-utara-melakukan-serangan-verbal-terhadap-korsel/ Pada tanggal 12 september 2011, 17.30 wib

isyarat perang. Korea Utara tidak akan pernah meninggalkan program nuklirnya, karena menurut negara ini memiliki Program Nuklir adalah penting untuk melindungi negara dari ancaman dari ketertinggalannya oleh negara-negara asing.

Keputusan Korea Utara untuk menolak kebijakan Korea Selatan dipengaruhi oleh situasi politik (*domestic politic*) dalam negeri yang berperan penting dalam pembuatan keputusan. Kebijakan Korea Selatan yang mengaitkan bantuan ekonomi dengan perlucutan senjata nuklir Korea Utara telah menimbulkan berbagai tuntutan dari pihak Pyongyang. Kondisi perekonomian Korea Utara yang sangat kurang baik telah menjadikan rakyatnya menderita dan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ditengah menghadapi kesulitan ekonomi, pemerintah Korea Utara menerapkan filosofi *Juche* yaitu percaya pada diri sendiri yang mengakibatkan Korea Utara mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Sistem ekonomi dan politik dikontrol ketat. Korea Selatan merupakan negara yang rutin memberikan bantuan kepada Korea Utara. Tercatat bahwa Korea Selatan sering mengirim bantuan berupa pangan sebanyak 400.000 ton beras serta 300.000 ton pupuk bagi Korea Utara setiap tahunnya dalam bentuk pinjaman. Jumlah yang sangat berarti bagi perekonomian Korea Utara, bantuan tersebut diberikan dengan harapan agar pemerintah Korea Utara mampu mengatasi kelaparan yang melanda warganya. Korea Selatan menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Korea Utara setelah Cina. Ekonomi Korea Utara semakin menjadi bergantung pada Korea Selatan.

Sejak Lee Myung Bak resmi menjadi presiden Korea Selatan, ia menerapkan kebijakan yang mengaitkan bantuan ekonomi dengan denuklirisasi yang menjadikan perekonomian Korea Utara mengalami penurunan akibat kurangnya bantuan dari Korea Selatan. Korea Utara dengan ekonomi diperkirakan 20 miliar dolar setahun akan kehilangan paling tidak satu miliar dalam bantuan yang diberikan Korea Selatan setiap tahunnya.⁶ Korea Utara yang memiliki kemampuan militer lebih besar hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan Korea Selatan merasa mampu untuk memberikan reaksi-reaksi menentang kebijakan Korea Selatan. Reaksi keras berupa penutupan perbatasan dan peluncuran rudal dilakukan pihak militer untuk menyampaikan rasa tidak senangnya dengan kebijakan Korea Selatan sekaligus menginginkan agar Korea Selatan mengubah kebijakan terhadap Pyongyang.

Adapun reaksi Korea Utara terhadap kebijakan Korea Selatan memberhentikan bantuan ekonomi terhadap Korea Utara adalah melakukan penolakan melalui manuver demonstrasi kekuatan militer. Berbagai bentuk penolakannya yaitu:

1. Militer Korea Utara menutup perbatasan berupa penutupan jalur darat yang menghubungkan Korea Utara ke Korea Selatan

Menurut Kantor berita resmi Korut KCNA, langkah penutupan perbatasan itu merupakan respon atas penolakan Seoul menghormati kesepakatan-kesepakatan yang

⁶ Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/06/24/16013137/> Pada tanggal 12 september 2013, 17.30 wib

dicapai pada KTT antar-Korea pada 2000 dan 2007. Menurut KCNA, penutupan itu merupakan tahap pertama dalam respon tersebut.

Jalur darat utara-selatan antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah jalur penting pertukaran ekonomi dan personil antara Utara dan Selatan Semenanjung Korea. Begitu jalur itu ditutup, akan langsung mempengaruhi proyek kerjasama ekonomi pariwisata Gunung Geumgang dan Taman Industri Kaesong di Korea Utara serta proyek kerjasama kemanusiaan antara lain pertemuan kerabat yang terpisah. Presiden baru Korea Selatan Lee Myung Bak sejak memegang jabatan Februari 2008 lalu telah menyesuaikan kembali kebijakan terhadap Korea Utara dengan menekankan perlunya kerjasama ekonomi antara Korea Utara dan Selatan didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, serta mengaitkan kerjasama ekonomi antara kedua pihak dengan masalah denuklirisasi Korea Utara. Lee Myung Bak menyatakan akan mempertimbangkan kembali serangkaian persetujuan yang telah dicapai antara Korea Utara dan Korea Selatan termasuk Deklarasi Bersama Utara-Selatan, dan Deklarasi Tentang Pengembangan Hubungan Utara-Selatan serta Perdamaian dan Kemakmuran yang ditandatangani oleh mantan Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Il. Kedua deklarasi yang merupakan dokumen program hubungan antara kedua Korea itu adalah dasar pengembangan pertukaran dan kerjasama antara kedua pihak, tapi pemerintah Lee Myung Bak mengambil sikap tegas atas kedua deklarasi tersebut, maka mengundang reaksi keras pihak Korea Utara sehingga semua dialog antar pemerintah kedua pihak terputus.

2. Peluncuran rudal jarak dekat oleh Korea Utara

Pada tahun 2008, Korea Utara akhirnya mau menuruti apa yang diharapkan masyarakat internasional, tapi dengan syarat-syarat tertentu terkait dengan latar belakang mengapa Korea Utara melakukan pengembangan nuklir. Belum berjalan satu tahun, pada Mei 2009, Korea Utara meluncurkan rudal di atas Jepang yang diklaim sebagai rudal pengecek cuaca. Hal ini menjadi api kemarahan dunia internasional terhadap Korea Utara, karena dengan nyata telah menunjukkan adanya ancaman yang keras terhadap perdamaian dan ketentraman negara lain. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar Korea Utara dijatuhkan sanksi berdasarkan Bab Tujuh dari Piagam PBB yang mengatur mengenai “ancaman terhadap ketentraman” dan “tindakan untuk melakukan agresi”. Berdasarkan desakan internasional dan Piagam PBB tersebut maka makin gencarlah embargo yang terjadi pada Korea Utara dan negara tersebut semakin diisolasi negara-negara lain. Perwakilan Energi Atom Internasional melaporkan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah mengancam rezim anti pengembangbiakan bahan nuklir dan juga telah menciptakan konflik keamanan

yang cukup serius, tidak hanya pada kawasan Asia Timur tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional.⁷

Untuk mempertegas kemarahannya, Korea Selatan menghentikan pengiriman bantuan pangan ke Korea Utara. Korea Selatan menjanjikan paket bantuan senilai 10 miliar won termasuk beras, mi instan, semen, dan pasokan barang darurat lainnya setelah banjir besar Agustus 2010 yang menghantam Korea Utara. Bahkan, Beberapa jet tempur, kapal perang, kapal selam, dan kendaraan lapis baja artileri telah disiagakan di Pulau Yeongpyeong dan sekitarnya, sebagai basis utama angkatan bersenjata Korea Selatan di perbatasan. Hal ini membuktikan bahwa Korea Selatan tidak segan-segan untuk memulai perang dengan Korea Utara.

Pada pidato Lee Myung Bak pada saat sidang umum PBB menegaskan bahwa jika Korea Utara memilih jalur untuk mewujudkan keadaan saling menguntungkan dan kesejahteraan bersama, Korea Selatan dan seluruh komunitas internasional akan ikut serta bekerjasama dengan senang hati. Pernyataan Presiden Lee tersebut menekankan sekali lagi posisi pemerintah Korea Selatan dalam membina hubungan dengan Korea Utara. Prinsip tersebut artinya bahwa Korea Utara harus menghentikan pengayaan uranium dan uji-coba nuklinarya serta meminta maaf atas kejadian penenggelaman kapal Angkatan Laut Korea -Cheonan dan serangan artileri terhadap pulau Yeonpyeong guna mempererat hubungan anta-Korea.

3. Pengusiran pejabat Korea Selatan dari kompleks Industri Gaesong

Dalam pertemuan konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea 13-15 Juni 2000 telah ditandatangani Deklarasi Bersama Korea Selatan-Korea Utara (*South-North Joint Declaration*) yang diharapkan dapat menjadi landasan utama bagi babak baru hubungan antar Korea dengan melaksanakan kerjasama di berbagai bidang. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah di bidang ekonomi dimana Korea Utara menyediakan beberapa distrik ekonomi khusus (*Special Economic Zone/SEZ*) untuk dijadikan kompleks industri, yaitu Gaesong (Kaesong), Shinuju, dan Najin/Sonbong.

Penetapan Komplek Industri Gaesong sebagai salah satu zona ekonomi khusus bukan hanya menjadi simbol persatuan Korea tetapi juga menandai sebuah upaya membangun hubungan antar Korea yang akan mengarah pada percepatan proses reunifikasi secara damai kedua Korea. Gaesong adalah kompleks perindustrian di wilayah Korea Utara dan dikelola oleh Hyundai Asan Corporation yang merupakan salah satu *chaebol* di Korea Selatan. Investasi yang dilakukan Korea Selatan ini tergolong sebagai bentuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*) karena Korea Selatan di samping sebagai penanam modal, ia juga mengelola operasionalisasi kompleks industri ini. Korsel menggunakan *Korea Land Corporation* pengembang

⁷ A.R Sutopo, "Perkembangan Pemikiran Strategi Nuklir Barat", dalam Analisa CSIS, No. 2, 1986, hal. 73

dari Korea Selatan sebagai tenaga ahli dalam membangun Komplek Industri Gaesong (KIK). Tetapi Korea Utara sekali lagi melakukan keputusan sepihak. Pengusiran warga Korea Selatan itu merupakan reaksi Pyongyang atas sikap Seoul.

Sejak dilantik Februari 2008, Presiden Lee berjanji akan bersikap tegas kepada Pyongyang. Lee mengharuskan Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya jika ingin mendapatkan bantuan dari Korea Selatan. Korut menolak berdialog sampai Lee mencabut kebijakan garis kerasnya. Kalangan analis mengatakan, pengusiran itu merupakan langkah mundur dalam hubungan kedua Korea. Tindakan itu juga dipandang telah merusak kredibilitas Korea Utara sebagai mitra bisnis Korea Selatan. Sebab, perusahaan-perusahaan Korea Selatan telah mengucurkan dana ratusan juta dolar untuk menjalankan proyek-proyek pabrik di Gaesong. Saat ini, mereka diperkirakan enggan berinvestasi di sana.⁸ Padahal, Bagi Korea Selatan, keberadaan Komplek Industri Gaesong ini bukan hanya dapat membantu perekonomian Korea Utara, tapi Gaesong juga merupakan sebuah faktor utama dalam pembangunan dan mereformasi ekonomi Korea Utara yang menuju ke arah terciptanya reunifikasi kedua Korea. Secara demikian, dapat dimaknakan bahwa eksistensi Komplek Industri Kaesong ini sangat menguntungkan Kedua pihak, terutama bagi pemulihan ekonomi Korea Utara. Apalagi dalam makro strategi Gaesong memiliki makna baik ekonomi (pembangunan industri) maupun politik (reunifikasi korea).

4. Latihan militer antara Korea Utara dan Rusia

Dalam upaya mengimbangi pengaruh Korea Selatan atas kebijakan barunya, Korea Utara memutuskan untuk mengadakan latihan militer dengan Rusia dimana latihan ini merupakan latihan militer yang pertama kali bagi Korea Utara untuk mengadakan latihan bersama militer lain. Kesepakatan menggelar latihan militer bersama ini tercapai dalam pertemuan antara pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-il dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev di Siberia, Rusia.⁹ Korea Selatan pun mungkin akan mengawasi latihan ini, meski diperkirakan tidak akan melibatkan penggunaan senjata.

Korea Utara mulai meningkatkan kekuatan militernya pada tahun 1960-an. Doktrin dan struktur kekuatan militer Korea Utara saat itu berorientasi ofensif.¹⁰ Ketidakmampuan Korea Utara untuk menjalin hubungan baik dengan pihak Barat, membuatnya memiliki daya saing pertumbuhan yang lemah. Menurut pendapat kaum Realis, ini menjadikan Korea Utara berusaha memproteksi diri dengan menerapkan strategi militer sebagai satu-satunya sumber *power*. Ditambah lagi dengan ideologi Korea Utara yang disebut *Juche* yaitu praktek isolasi yang mana meminimalisir

⁸ Diakses dari <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/12/01/41583/Warga-Korsel-Berbondong-bondong-Tinggalkan-Korut> Pada tanggal 17 Januari 2013, 16.37 wib

⁹ Diakses dari <http://health.kompas.com/read/2011/09/13/13085699/www.kompas.com> Pada Tanggal 04 Juni 2013

¹⁰ Byung-joon Ahn, "*Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur*," (CSIS, 1990), hlm. 159.

hubungan dengan Negara kecuali Rusia dan China yang menyebabkan Korea Utara semakin tertutup dengan dunia luar.

Adapun kesiagaan militer yang dilakukan oleh dua Korea adalah perwujudan dari kekuatan nasional masing-masing. Kesiagaan militer memerlukan pranata yang menunjang secara total seperti inovasi teknologi. Sama halnya yang dilakukan Korea Utara dalam memperbaharui dan selalu melengkapi armada militer mereka seperti rudal balistik, artileri-artileri, pesawat tempur, tank serta kapal selam dan kapal perang. Nasib Negara dan peradaban sering ditentukan oleh perbedaan dalam teknologi peperangan apalagi jika pihak yang lemah tidak dapat mengimbangi dengan cara-cara lain.

KESIMPULAN

Dalam dinamika krisis nuklir dan persenjataan, peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara juga meningkatkan kadar ancaman yang mungkin dirasakan oleh negara lain. Pemilikan senjata yang lebih rendah akan mengurangi persepsi tingkat ancaman itu tanpa mengubah kekuatan relatif dan mungkin akan membuka jalan ke arah penyelesaian politik. Selama tingkat pemilikan persenjataan masih tinggi, selama itu penyelesaian melalui jalur politik mungkin akan selalu menemui jalan buntu.

Berbagai Upaya pendekatan, kebijakan dan usaha lainnya yang telah dilakukan oleh pemimpin Korea Selatan sebelum Lee Myung Bak tampaknya menjadi sedikit sia-sia dikarenakan kebijakan baru yang tegas yang di ambil oleh Lee Myung Bak. Dalam kaitan dengan itu, kerjasama non militer dapat memainkan peranan penting karena kerjasama politik saja tanpanya tidak akan mampu menciptakan hubungan yang stabil untuk jangka waktu yang lama, dan kerjasama ekonomi memainkan peran yang paling penting dalam upaya mengatasi konflik termasuk krisis nuklir sekalipun. Hubungan dan kerjasama bidang ekonomi antar dua negara dapat meredam atau mengurangi kecenderungan konflik. Kaum liberal beranggapan bahwa meningkatnya hubungan ekonomi akan memperbesar kemungkinan suatu negara untuk memperoleh keuntungan bersama, jika negara itu memilih kerjasama dan bukan konflik. Jaringan kerjasama yang saling menguntungkan ini justru sebagai pengikat dan merasa saling tergantung satu sama lain. Korelasi hubungan ekonomi tersebut, jika ia memenuhi persyaratan tertentu, dapat mengurangi kemungkinan konflik.

Korea Selatan boleh saja kuat secara ekonomi, memiliki kepastian dukungan dari Amerika Serikat. Namun, diantara semuanya, tentu yang sangat menakutkan adalah kemampuan nuklir Korea Utara, yang diperkirakan mampu mencapai setiap jengkal Korea Selatan. Dalam perang dengan waktu terbatas atau singkat, mempertimbangkan faktor kejutan dan tanpa mempertimbangkan faktor teknis & non-teknis, Korea Utara akan mampu tampil dominan dengan misil-misilnya sehingga kota-kota besar terutama kota industri Korea Selatan mampu

segera dihancurkan, bahkan sebelum Korea Selatan bergerak dan menyadari bahwa telah terjadi serangan. Namun, dalam perang dengan waktu yang tak terbatas, tak dapat diprediksikan kemenangan akan berpihak pada kubu mana. Sekalipun Amerika Serikat dan sekutunya berada dibelakang Korea Selatan, dan belum tentu Rusia maupun Cina akan berpihak pada Korea Utara. Yang pasti terjadi adalah kehancuran di kedua Korea.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Irsan. 2007. *Budaya dan Perilaku politik Jepang di Asia*. Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu.

Jurnal

A.R. Sutopo, 1986. “*Perkembangan Pemikiran Strategi Nuklir Barat*”, dalam Analisa CSIS, No. 2.

Byung-joon Ahn, “*Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur*,” (CSIS, 1990)

Robert A Scalapino & Seizaburd Sato. 1990. “*Masalah Keamanan Asia*.” (penyunting), Jusuf Wanandi, Jakarta

Artikel

Harian Kompas, 2011. *Korea Utaran dan Rusia Gelar Latihan Militer Bersama*.

Diakses 04/06/13 di <http://health.kompas.com/read/2011/09/13/13085699/>.

Kbs World Vietnamese. *Korea Utara Melakukan Serangan Verbal terhadap Korsel*.

Diakses dari [http://rki.kbs.co.kr/vietnamese/news/news_issue_detail.htm?](http://rki.kbs.co.kr/vietnamese/news/news_issue_detail.htm?No=12413/koreautara-melakukan-serangan-verbalterhadap-korsel/)

No=12413/koreautara-melakukan-serangan-verbalterhadap-korsel/ Pada tanggal 12 september 2011, 17.30 wib.

Nasional Kompas, 2010. *Ekonomi Korea Terus Menyusut*,

Diakses 12/09/2011, di <http://nasional.kompas.com/read/2010/06/24/16013137/>.

Suara Merdeka, 2008. *Warga Korsel Berbondong-bondong Tinggalkan Korut*, Diakses

17/01/2013, di [http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/12/](http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/12/01/41583/Warga-Korsel-Berbondong-bondong-Tinggalkan-Korut)

01/41583/Warga-Korsel- Berbondong-bondong-Tinggalkan-Korut.

Working Paper

Fikri Syuhada. 2009. "*Faktor-Faktor Korea Utara membatalkan Perjanjian Reunifikasi Korea*".

Skripsi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.